

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kerangka regulasi masa jabatan kepala desa telah diatur dalam beberapa rezim undang-undang sebelum, dan pada era reformasi. Kerangka tersebut menjabarkan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa di Indonesia terus berubah-ubah, dan tidak ada pakem yang jelas atas ketentuan pembatasan masa jabatan.
- b. Tren penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, korupsi sektor desa selalu menjadi tiga teratas dari jumlah kasus korupsi yang ada. Tipologi kasus 2015–2021 korupsi sektor desa terbagi menjadi lima yakni: (i) 14 kasus penggelembungan anggaran, (ii) 15 kasus proyek atau kegiatan fiktif, (iii) 36 kasus laporan fiktif, (iv) 44 kasus penyelewengan anggaran dan (v) 44 kasus penggelapan.
- c. Pada 2022 terdapat pergeseran tipologi kasus korupsi sektor desa (i) 54 kasus penggelembungan anggaran, (ii) 14 kasus proyek/kegiatan fiktif, (iii) 14 kasus laporan fiktif, (iv) 1 kasus penyelewengan anggaran dan (v) 0 kasus penggelapan
- d. Faktor penyebab terjadinya korupsi pada sektor desa adalah minimnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Hal ini diperparah dengan mahalnya biaya politik dan ongkos sosial.
- e. Faktor minimnya partisipasi, transparansi dan mandulnya BPD semakin memburuk pada periode kedua dibuktikan dengan adanya lima puluh tiga kasus korupsi sektor desa yang semakin menguat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

masa jabatan kepala desa berimplikasi pada tingkat korupsi yang terjadi di sektor desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme seri Tata Negara, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007)
- Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah Tarsito, Bandung, 1976, Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 2-3.
- Dr. Amirudin dan Prof. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.
- HAW Widjaja. Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- HAW Widjaja. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Jaka Tri Widaryanto. Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa. dalam dalam Jamil Gunawan dkk (editors), Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, (Jakarta: LP3ES), 2005
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (London:Sage Publications, Inc.)
- Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Soetardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1984).

Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru* (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2015)

Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dan Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Jurnal

Abdul Rahman Kanang. “Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945” *Al-Daylahi* Vol.7/No.1/ Juni 2019.

Bambang Hartono, dkk. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.sus-Tpk/2021/Pn.Tjk). *Jurnal Sol/Justisia* Vol.5 No.2 Desember 2022.

Dian Herdiana, “ Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.50 No. 1 (2020).

Dudi Warsudi, Hayatun Hamid., “ Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 10 No.1 Tahun 2023.

Farizi Ramadhan dan Parfi Khadiyanto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata di Desa Wisata Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta” *Jurnal Teknik PWK*, Vol 3 Nomor 4, 2014.

Fathur Rahman, “Korupsi di Tingkat Desa.” *Governance*, Vol.2, No.1, November 2011.

Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), “*Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case*”, *Disertasi Doktor Philosophy, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur*.

Hasrat Arif Saleh, “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Government* 1, no. 1 (2008): 1–23; Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013); M Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Republik Indonesia, 2015); Udiyo Basuki, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 321–344; Nurcholis Hanif, “Dua Ratus Tahun Praktik Demokrasi Desa: Potret Kegagalan
- Indra Rahmatullah, “Rejuvenasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” *Jurnal Cita Hukum* Vo. I. No. 2 Desember 2013.
- R.A. Anggraini, “Partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial” Tesis Magister Universitas Indonesia, Indonesia 2020.
- Rasina Padeni Nasution, *Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Syariah dan Hukum* Vo.2, No.2 Juli-Desember 2020,
- Richard Timotius, “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 323–344, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1666>.
- Sherry R. Arnstein (1969) “*A Ladder Of Citizen Participation*”, *Journal of the American Institute of Planners*, 35:4, 216-224, DOI: [10.1080/01944366908977225](https://doi.org/10.1080/01944366908977225)
- Sri Daniati, “Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Kesimantengah” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol 5, No. 2. pp 172-180, 2019.
- Teti Anggita Sari dan Rigel Nurul Fathah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal Litbang Sukowati* Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018.

Artikel

- Alfurkon Setiawan, “Membangun Indonesia dari Pinggiran Desa” *setkab.go.id* 24 Juni 2019 diakses pada 15 Maret 2023 <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>
- BPS Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022. *bps.go.id* dilansir laman https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1 diakses pada 5 Maret 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20221115104547-14-388052/pemanfaatan-dana-desa-dan-kesejahteraan-masyarakat-indonesia> diakses pada 06 Juni 2023

Rauf Nuryama, “Jumlah Penduduk Indonesia Pada Tahun 2022” *Tinewss.com* 14 Juni 2022, diakses pada 14 Maret 2023, <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617715/jumlah-penduduk-indonesia-pada-tahun-2022#:~:text=49%2C7%20persen%20penduduk%20Indonesia,1%20persen%20tinggal%20di%20pedesaan.&text=Usia%20rata%2Drata%20penduduk%20di%20Indonesia%20adalah%2030%2C3>.

Tanpa Nama, “Dana Desa” dilansir dalam laman <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf> diakses pada 17 Juni 2022

Vika Aziky Dihni, Korupsi Banyak Menggunakan Modus Laporan Fiktif pada 2021 Semester-1 *katadata* 14 Oktober 2021 dilansir pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/kasus-korupsi-banyak-gunakan-modus-proyek-fiktif-pada-semester-i-2021> diakses pada 21 Juni 2023

Skripsi/Tesis

Achmad Mudatsir R, “Politik Hukum Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pemerintahan Desa Pasca Reformasi” Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen III

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen IV

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014).

UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Rincian Dana Desa setiap Desa.

PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wawancara

Almas Sjafrina (Indonesia Corruption Watch), pada 09 Juni 2023 melalui zoom, <https://us06web.zoom.us/j/84616296995?pwd=YVlTenRxVmFVMWpVRG5lTURVMWozdz09>

Alfian (Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh), pada 11 Juli 2023 melalui zoom <https://us04web.zoom.us/j/73891008595?pwd=bmgqEON3h7MgcPloue3ZPOqkG2gcH3.1>

Arifin Abdul Majid (Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia/APDESI) pada Senin, 12 Juni 2023 di Plaza Festival, Kuningan Jakarta Selatan.

Rohidin Sudarno (Senior Operation Manager Pusat Telaah Informasi Regional), pada Selasa, 06 Juni 2023 di Kantor Pattiro, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.